

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan pemaparan yang disampaikan oleh peneliti sehubungan dengan data dan fakta yang telah peneliti dapatkan dari lapangan penelitian ini serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang focus penelitian, dimana berdasarkan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Ada enam variable menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut (Agustino, 2008: 141), yaitu: mengenai ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang terakhir yaitu lingkungan social, ekonomi, dan politik. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi Peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan khususnya perpustakaan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan mengacu ke dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan no. 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan yaitu dengan memberikan dasar hukum dan pedoman bagi para pegawai perpustakaan di wilayah Kota Tangerang Selatan untuk bekerja sama agar lebih terorganisir, terarah dan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan literasi dan pengetahuan untuk seluruh masyarakat, terutama bagi generasi muda yang dijadikan sebagai asset masa depan bangsa.

Selanjutnya untuk ukuran pada tingkat keberhasilan dalam meningkatkan literasi generasi muda di Kota Tangerang Selatan dapat ditentukan berdasarkan dari sejumlah indicator yang relevan sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan no.2 Tahun 2016. Ukuran-ukuran tersebut harus bersifat realistis untuk mencerminkan kemajuan yang sebenarnya dalam meningkatkan literasi generasi muda di Kota Tangerang Selatan. Serta evaluasi dan pemantauan secara berkala yang akan membantu memastikan bahwa tujuan dan standar dari kebijakan ini tercapai.

2) **Sumber Daya**

Sumber daya juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja Implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi generasi muda. Sumber daya yang dilihat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan, sumber daya anggaran yang disiapkan oleh para agen pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini, dan sumber daya sarana dan prasarana. Untuk penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang memainkan peran kunci dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan merupakan para stakeholder yang dapat merujuk dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini seperti Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Dinas-dinas yang terlibat, sekolah, pihak swasta, dan komunitas-komunitas, elit politik dan lainnya. Seluruh stakeholder ini memiliki peran untuk saling mendukung dan melakukan Kerjasama untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, efisien yang sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan ini.

b. **Sumber Daya Anggaran**

Terkait dengan sumber daya anggaran, jumlah anggaran untuk melaksanakan program kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Daerah no.2 Tahun 2016 ini setiap tahunnya berbeda-beda besarnya karena anggaran tersebut berasal dari APBD. Pentingnya mengalokasikan anggaran yang memadai dalam kebijakan meningkatkan literasi generasi di Kota Tangerang Selatan mempunyai

anggaran yang mencukupi untuk penyelenggaraan program-program serta kegiatan literasi yang berkualitas, serta menciptakan lingkungan literasi yang kondusif bagi perkembangan dan potensi generasi muda. Selain itu, adanya partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak juga dapat menjadikan tambahan anggaran untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan ini.

c. **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sumber daya sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan. Pengelolaan waktu yang efisien, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ini akan berdampak langsung pada suatu keberhasilan pelaksanaan program-program literasi ini agar mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Sumber daya sarana dan prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan ini sudah cukup memadai seperti tersedianya rak buku, berbagai macam koleksi buku bacaan, meja, kursi, komputer serta memiliki beberapa mobil yang digunakan sebagai penyelenggaraan program perpustakaan keliling sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sulit di jangkau wilayah serta sekolah yang masih belum memiliki sarana perpustakaan. Pengelolaan sumber daya waktu, sarana dan prasarana yang dilakukan dengan baik akan memberikan dampak yang positif bagi suatu keberhasilan Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan. Serta integrasi dan alokasi sumber daya yang tepat ini akan menciptakan suatu lingkungan literasi yang inklusif, menginspirasi terhadap minat literasi dikalangan masyarakat umum khususnya generasi muda, dan memberikan manfaat jangka Panjang bagi perkembangan mereka dalam kegiatan membaca dan belajar.

3) **Karakteristik Agen Pelaksana**

Pembahasan yang telah disampaikan sangat komprehensif dan mendetail dalam menganalisis pusat perhatian pada agen pelaksana dalam

implementasi kebijakan public untuk meningkatkan literasi. Berikut adalah ringkasan dan penjelasan lebih lanjut tentang aspek-aspek penting yang dibahas:

1. Peran Berbagai Unsur/Stakeholder:

Peningkatan literasi merupakan tugas bersama yang melibatkan berbagai pihak atau stakeholder. Terlibatnya sekolah, masyarakat umum, para pegawai, pemerintah, dan pihak swasta memungkinkan program-program peningkatan literasi menjadi lebih komprehensif dan dapat mencapai lebih banyak kalangan. Setiap unsur/stakeholder memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam upaya meningkatkan literasi, dan melibatkan mereka dapat memperkaya program dengan perspektif yang beragam.

2. Karakteristik Agen Pelaksana:

Pada implementasi kebijakan public untuk peningkatan literasi, karakteristik atau ciri-ciri agen pelaksana menjadi faktor penting. Jika kebijakan bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, agen pelaksana harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan lebih berfokus pada perubahan perilaku dasar manusia, agen pelaksana yang diturunkan tidak harus sekeras dan setegas pada situasi sebelumnya. Penyesuaian karakteristik agen pelaksana dengan tujuan kebijakan dapat meningkatkan efektivitas implementasi.

3. Dukungan dan Hubungan yang Baik antar Stakeholder:

Pola hubungan antar stakeholder atau unsur yang terlibat sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan literasi. Pernyataan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (I3) menekankan pentingnya komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan implementasi. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta mengurangi potensi hambatan dan konflik.

4. Sasaran Utama Implementasi Kebijakan:

Sasaran utama dalam implementasi kebijakan peningkatan literasi meliputi kelompok masyarakat umum, sekolah, generasi muda dengan tingkat penasar tinggi terhadap literasi, dan pesantren. Sasaran ini mencakup berbagai kelompok yang berperan dalam meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat. Dengan mengidentifikasi sasaran utama dengan tepat, program literasi dapat lebih terfokus dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Pentingnya Dampak Positif dan Berkelanjutan:

Implementasi kebijakan literasi yang melibatkan berbagai unsur/stakeholder dengan kerjasama dan komunikasi yang baik berpotensi menciptakan dampak yang lebih positif dan berkelanjutan dalam masyarakat. Peningkatan literasi yang berhasil akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekolah, dan generasi muda. Penting untuk memastikan program-program literasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Pada akhirnya, keseluruhan analisis menekankan pentingnya kerjasama dan keterlibatan berbagai unsur/stakeholder dalam program peningkatan literasi, serta pentingnya pola hubungan yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan cara ini, implementasi kebijakan literasi dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang diharapkan dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi di masyarakat, terutama pada generasi muda.

4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana dalam Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat dari para stakeholder dalam implementasi kebijakan literasi generasi muda di daerah tersebut. Beberapa poin penting dari pembahasan tersebut adalah:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Para Stakeholder:

Dari analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemerintah daerah dan para stakeholder yang terlibat dalam kebijakan literasi memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya meningkatkan literasi generasi muda. Komitmen ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan kesuksesan dalam implementasi kebijakan literasi tersebut.

2. Sinergi dalam Mendukung Kebijakan:

Salah satu temuan penting dari analisis adalah adanya sinergi antara para stakeholder dalam mendukung kebijakan literasi. Sinergi ini mencerminkan kesepakatan dan kesamaan pandangan dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak memungkinkan program literasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan maksimal.

3. Dukungan Pengembangan dan Peningkatan Literasi:

Para stakeholder tidak hanya sekadar mendukung program literasi yang sudah ada, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan peningkatan literasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah terkait. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, seperti menyediakan sarana dan prasarana, pendanaan, serta pengembangan program-program literasi yang lebih inovatif dan berdampak positif.

4. Keterlibatan Para Stakeholder:

Meskipun dalam analisis hanya disebutkan dua kepala bidang yang terlibat, namun terlihat bahwa kebijakan literasi ini melibatkan berbagai pihak atau stakeholder lainnya yang juga memiliki komitmen dan berperan aktif dalam implementasi kebijakan tersebut. Keterlibatan berbagai pihak ini menandakan adanya dukungan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan, yang dapat memperkuat pelaksanaan kebijakan literasi.

5. Kekurangan Regulasi Khusus:

Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah belum adanya Peraturan Daerah khusus yang secara eksplisit membahas tentang literasi. Meskipun demikian, terdapat dukungan melalui Peraturan Walikota yang

mendukung pelaksanaan kegiatan literasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi khusus belum tersedia, upaya untuk meningkatkan literasi masih tetap berjalan dan didukung oleh aturan yang ada.

6. Pendisposisian Pelaksanaan Kegiatan:

Pemanfaatan Dukungan Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai panduan untuk menentukan dan mengakomodasi pelaksanaan kegiatan literasi adalah langkah yang positif. Dengan mengacu pada DPA, dinas dapat merencanakan dengan lebih terstruktur dan mengalokasikan anggaran yang tepat untuk mendukung program literasi yang telah direncanakan. Pendisposisian yang baik akan memastikan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia.

7. Sanksi dan Penghargaan:

Pendekatan sanksi dan penghargaan yang diadopsi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja. Sanksi diberlakukan sebagai bentuk dorongan agar pegawai tetap berkinerja baik, sedangkan penghargaan digunakan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berorientasi pada kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi dalam upaya meningkatkan literasi.

8. Fokus pada Performa dan Etika Kerja:

Pemerintah daerah dan para stakeholder dalam kebijakan literasi juga menekankan pentingnya performa dan etika kerja pegawai. Fokus ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang lebih baik.

Pembahasan tersebut menggambarkan komitmen dan dukungan yang kuat dari para stakeholder dalam implementasi kebijakan meningkatkan literasi generasi muda di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Adanya sinergi antara berbagai pihak, dukungan pengembangan dan peningkatan literasi, serta pendekatan sanksi dan penghargaan menjadi faktor penting

dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan literasi tersebut. Meskipun terdapat kekurangan dalam regulasi khusus, upaya untuk meningkatkan literasi tetap dilakukan dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kebijakan literasi ini dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi generasi muda di Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

5) **Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengenai kebijakan meningkatkan literasi generasi muda di Kota Tangerang Selatan menunjukkan beberapa hal penting antaralain:

1. Pentingnya Sosialisasi dan Koordinasi:

Sosialisasi dan koordinasi memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan literasi. Kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, komunitas, dan masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik, tumpang tindih tugas dapat dihindari, dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak terkait dapat dipahami dengan jelas.

2. Tujuan Sosialisasi:

Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang pentingnya literasi kepada seluruh masyarakat di wilayah Tangerang Selatan. Melalui sosialisasi yang merata ke berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan, sekolah-sekolah, TK, dan PAUD, diharapkan pesan tentang literasi dapat disampaikan secara menyeluruh.

3. Berbagai Metode Sosialisasi:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tangerang Selatan menggunakan berbagai metode sosialisasi, mulai dari sosialisasi langsung di perpustakaan dan sekolah, hingga penggunaan teknologi digital melalui platform "I-tangsel" dan kegiatan perpustakaan keliling. Pendekatan beragam ini membantu mencapai lebih banyak orang dan menciptakan minat yang lebih besar terhadap literasi.

4. Pembinaan dan Ajakan untuk Membaca:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga berusaha membina dan mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencintai membaca. Pembinaan ini mencakup inisiatif seperti membaca selama 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, untuk membentuk kebiasaan membaca yang lebih sering dilakukan oleh siswa.

5. Peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Dinas ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, menggalakkan promosi gemar membaca, serta membantu mengembangkan layanan perpustakaan yang merata. Seluruh peran dan tugas dinas ini didasarkan pada tupoksi yang telah diatur dalam peraturan daerah.

6. Hambatan dan Tantangan:

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, seperti minimnya keinginan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkunjung ke perpustakaan. Kurangnya dukungan dari guru-guru juga menjadi hambatan dalam memotivasi siswa untuk membaca. Selain itu, terbatasnya waktu untuk membaca, minimnya bahan bacaan yang tersedia, dan rendahnya kesadaran tentang pentingnya membaca menjadi tantangan yang perlu diatasi.

7. Solusi dan Upaya Mengatasi Hambatan:

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih intensif, bekerja sama dengan pihak sekolah dan komunitas, serta terus berinovasi dalam menyajikan kegiatan dan bahan bacaan yang menarik. Selain itu, pendekatan yang menyenangkan dan memberikan penghargaan atas kegiatan membaca dapat membantu meningkatkan minat baca generasi muda di Kota Tangerang Selatan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa Kebijakan Meningkatkan Literasi Generasi Muda di Kota Tangerang Selatan memerlukan sosialisasi yang merata, koordinasi yang baik, dan berbagai upaya untuk memotivasi dan membina minat baca generasi muda. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan ini dan dihadapkan pada tantangan untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan berbagai upaya dan kerjasama dengan pihak terkait, diharapkan kebijakan literasi ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu meningkatkan literasi generasi muda di wilayah Tangerang Selatan.

6) **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Pembahasan tersebut mengulas berbagai aspek terkait implementasi kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Lingkungan Sosial yang Kondusif:

Lingkungan sosial yang kondusif menjadi faktor pendukung penting dalam upaya meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, terutama generasi muda. Respon masyarakat terhadap perpustakaan keliling menunjukkan adanya dukungan positif dari lingkungan sekitar.

2. Peran Penting Dinas Perpustakaan:

Dinas Perpustakaan memiliki peran krusial dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pendidikan dan literasi.

3. Dukungan Antusias Masyarakat:

Secara umum, respon masyarakat terhadap kebijakan meningkatkan literasi cukup positif, terutama dari generasi muda. Masyarakat menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan.

4. Tantangan Kesadaran Literasi:

Terdapat sebagian generasi muda yang masih kurang tertarik terhadap literasi karena terbatasnya kesadaran mengenai manfaat dari literasi.

5. Faktor Pendukung Literasi:

Faktor-faktor seperti ketersediaan perpustakaan yang mudah dijangkau, fasilitas yang lengkap dan relevan, koleksi buku yang up-to-date, serta adanya akses internet dan ruang baca yang nyaman dapat meningkatkan motivasi generasi muda untuk memanfaatkan perpustakaan.

6. Program dan Kegiatan Menarik:

Kegiatan menarik, seperti diskusi buku, pelatihan keterampilan, seminar, dan kegiatan kreatif lainnya, dapat menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, dalam mendukung kebijakan ini.

Selanjutnya, pembahasan juga membahas dukungan dari para elit politik dan tokoh masyarakat dalam keberhasilan kebijakan ini. Dukungan dari para elit politik, termasuk DPRD, dalam mengalokasikan anggaran sangat penting dalam keberhasilan program ini. Dukungan dari para elit politik juga mencakup pemenuhan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan serta pengaruh kepemimpinan dan otoritas mereka dalam membujuk masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung kebijakan literasi. Selain dukungan dari elit politik, dukungan dari tokoh masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan kebijakan literasi. Tokoh masyarakat seringkali memiliki pengaruh yang kuat di kalangan masyarakat lokal, dan dukungan mereka dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap program literasi.

Pembahasan selanjutnya membahas dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi terhadap program peningkatan literasi. Dukungan dari lingkungan sosial dan ekonomi mempengaruhi kemauan dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam meningkatkan literasi. Sinergi dengan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi.

Terakhir, pembahasan menyoroti pengaruh perkembangan minat baca setelah implementasi kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan. Implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap

perkembangan minat baca di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Adanya kesadaran tentang pentingnya membaca, kegiatan-kegiatan seperti MCKIDS, dan program literasi lainnya menunjukkan adanya upaya aktif dalam mengajak generasi muda untuk gemar membaca.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan meningkatkan literasi di Kota Tangerang Selatan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, elit politik, dan tokoh masyarakat, serta lingkungan sosial dan ekonomi, berperan penting dalam menciptakan lingkungan literasi yang positif dan berdaya guna. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan kebijakan meningkatkan literasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan pada peningkatan minat baca dan literasi di masyarakat, khususnya generasi muda.